



Santri dan Politik: Revitalisasi Peran Santri dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Dalailul Choir ¹, Wahyu Trisno Aji ²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

dalailulchoir12@gmail.com ¹, wahyutrisnoaji@gmail.com ²

Abstract: *This paper aims to explain the importance of political literacy for Islamic boarding school students (santri) as a means to achieve Indonesia's golden age by 2045. This research focuses on qualitative methods with a literature study approach, focusing on primary data in the form of documentation, including books, journals, articles, and other literature related to political discussions and Islamic boarding school students. The results show that "santri" (literate people) or those seeking religious knowledge in Islamic boarding schools (pesantren) must possess broad insight and be tolerant of political apathy. Santri political awareness is essential for them to contribute to improving and strengthening Indonesia's political system with noble religious values. Santri involvement in politics also serves as a means to raise awareness as active citizens, strengthen nationalism, and make politics a form of service, not personal ambition. Politically literate students will be able to face various social and political challenges wisely and contribute to maintaining the nation's stability and progress. Therefore, a joint effort is needed to strengthen political education, both for santri and the general public, so that by 2045, Indonesia will have an intelligent, ethical generation ready to lead the nation towards a bright future.*

Keywords: Santri, Politics, Political Literacy, Pesantren, Golden Indonesia 2045

Abstrak, Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pentingnya santri untuk melekat terhadap politik untuk menjadi salah satu cara mensukseskan Indonesia emas 2045. Penelitian ini berfokus menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur sehingga fokus data primer digunakan berupa dokumentasi meliputi buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan politik dan santri. Diperoleh hasil bahwa Santri berarti “orang yang melekat huruf” atau pencari ilmu agama di pesantren, harus memiliki wawasan luas dan tidak bersikap apatis terhadap politik. Kesadaran politik santri diperlukan agar mereka mampu berkontribusi dalam memperbaiki dan memperkuat sistem politik Indonesia dengan nilai-nilai keagamaan yang luhur. Keterlibatan santri dalam politik juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran sebagai warga negara yang aktif, memperkuat rasa nasionalisme, dan menjadikan politik sebagai bentuk pengabdian, bukan ambisi pribadi. Santri yang melekat politik akan mampu menghadapi berbagai tantangan sosial dan politik dengan bijaksana, serta turut menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa. Sehingga perlu adanya upaya bersama untuk memperkuat pendidikan politik, baik bagi santri maupun masyarakat umum, agar menuju tahun 2045 Indonesia memiliki generasi yang cerdas, beretika, dan siap membawa bangsa menuju masa depan yang gemilang.

Kata kunci : Santri, Politik, Literasi Politik, Pesantren, Indonesia Emas 2045

1. PENDAHULUAN

Sejarah asal mula kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu “Polis” yang berarti kota berstatus Negara. Istilah politik diartikan berbagai macam kegiatan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Secara umum politik adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan Negara (Herberg & Kolja, 2023). Sedangkan istilah politik secara terminologi berasal dari bahasa Yunani dari kata “polis” yang memiliki arti “kota” dan *politea* atau warga negara. Dalam bahasa Arab sendiri politik diartikan sebagai *Siyasah* atau dalam terjemahan bahasa Inggris memiliki arti *Politics*. Politik tidak bisa diartikan dalam pemahaman tunggal, sebab jika melihat dalam kacamata yang lebih komprehensif. Politik dapat diartikan sebagai sebuah cara, bisa juga politik diartikan sebagai sebuah kekuasaan, politik juga dapat

diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan keseharian manusia, namun tetap pada satu konsistensi yang sama, politik dalam konsep berbangsa dan bernegara dimaknai sebagai ruang kekuasaan (Susulastuti et al., 2015).

Perlu untuk dipahami bahwa tindakan politik sangatlah luas, tidak sekedar soal pemerintah, negara dan kebijakan. Samuel Huntington dan Nelson mengemukakan bahwa partisipasi politik dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk tindakan politik keseharian yang mencerminkan keterlibatan individu dalam proses politik. Pertama, kegiatan pemilihan merupakan aktivitas dasar warga negara yang berhak untuk memilih atau dipilih sebagai pemimpin, mencerminkan partisipasi langsung dalam menentukan arah pemerintahan. Kedua, lobbying atau kegiatan melobi dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mempengaruhi keputusan pejabat atau tokoh tertentu demi kepentingan masyarakat luas. Ketiga, kegiatan organisasi menunjukkan partisipasi seseorang dalam kelompok atau lembaga, baik sebagai anggota maupun pengurus, untuk turut serta mempengaruhi kebijakan organisasi maupun pemerintah. Keempat, tindakan mencari koneksi menggambarkan upaya individu membangun jaringan sosial yang strategis demi memperoleh manfaat politik, ekonomi, atau sosial tertentu. Keempat bentuk ini menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak hanya terjadi di ruang formal, tetapi juga melekat dalam dinamika keseharian masyarakat yang terus berinteraksi dan bernegosiasi dengan kekuasaan (Huntington & Nelson, 1994).

Di Indonesia, kajian mengenai politik dalam melihatnya di ruang santri dan politik bukan sesuatu yang asing, dalam kontekstual negara menganut sistem demokrasi, sistem ini menghendaki bahwa semua warga negara punya hak untuk berpolitik, dalam hal ini dimaksudkan dipilih atau memilih, adanya hak maupun kewajiban sebagai warga negara (Sumantri, 2020). Seorang santri memang mereka yang belajar di pondok pesantren, belajar kitab kuning dari para kyai ilmu keagamaan. Namun bukan berarti santri tidak tahu menahu soal politik, faktanya mereka Adalah warga negara, mereka punya hak untuk berpolitik, mereka punya ruang untuk terlibat dalam kegiatan politik secara teoritis pemahaman maupun dalam bentuk praktis seperti melakukan kegiatan banyak hal dalam keseharian (Rismawati, 2022).

Kajian mengenai politik tentu menarik untuk diteropong lebih jauh, secara khususnya melihat bagaimana santri juga seorang warga negara republik Indonesia yang memiliki hak untuk memilih atau dipilih (Aisyah & Arif, 2020). Ketika melihat konteks apa perlunya santri memahami politik?, maka secara sederhana menjawab bahwa santri merupakan generasi masa depan yang akan menjadi pemimpin Indonesia, sekaligus juga merupakan bibit-bibit unggul yang akan hadir sebagai aktor utama dalam titik Indonesia emas 2045, maka sangat penting untuk memberikan ruang untuk santri berpolitik, setidaknya-tidaknya melekat terhadap politik

secara mikro maupun makro, dalam pemahaman ini politik tidak sekedar soal negara, pemerintah dan kebijakan (Rismawati, 2022). Namun juga politik soal cara atau seni mencapai sebuah tujuan Bersama dalam kehidupan (Huntington & Nelson, 1994).

Mengenai bagaimana kajian terdahulu mengenai santri dan politik, ditemukan beberapa penelitian meliputi Penelitian oleh Siti Aisyah dan Arif Chasannudin (2020) menjelaskan bagaimana pondok pesantren menjadi ruang pendidikan politik melalui pengajaran tentang kepemimpinan, pelatihan, dan penerapan budaya politik. Pemahaman politik diberikan agar santri tidak hanya berfokus pada urusan akhirat, tetapi juga memahami tanggung jawabnya sebagai warga negara yang memiliki hak dan suara dalam kehidupan bernegara. Kemudian penelitian Lalu Muhammad Fazlur Rahman (2023) menunjukkan bahwa peran santri di Lombok tidak terbatas pada kajian keagamaan semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan politik sebagai bentuk keterlibatan aktif dalam kehidupan masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa pondok pesantren menjadi pusat pembentukan sinergi antara nilai-nilai Islam dan realitas sosial-politik di tingkat lokal (Asiyah & Arif, 2020).

Kemudian penelitian Suci Rimawati dan Agus Satmoko Adi (2022) menjelaskan keterlibatan santri dalam politik lokal melalui dimensi kognitif, afektif, dan evaluatif. Di sisi lain, penelitian Imam Sumantri (2020) menegaskan bahwa kepatuhan santri terhadap kyai merupakan bagian dari tradisi dan adab pesantren yang turut mempengaruhi arah pilihan politik mereka. Kajian serupa oleh Ahmad Sufaidi, Rizca Yunique Putri, dan Sucahyo Tri Budiono (2023) menunjukkan bahwa dominasi dukungan pondok pesantren tidak selalu menjamin kemenangan kandidat, karena faktor lain seperti ketokohan, rekam jejak, dan praktik *vote buying* juga turut berperan. Adapun penelitian Fakhurrazi dkk. (2021) memperlihatkan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya menanamkan nilai keislaman, tetapi juga memperluas wawasan santri melalui pendidikan politik dan sosial, yang berfungsi membentuk identitas muslim yang adaptif terhadap isu-isu kontemporer.

Dari penelitian terdahulu diatas, menjadi satu bagian point penting melihat bagaimana santri dan politik bukan sesuatu hal berjauhan, sehingga dari latar belakang diatas inilah penelitian ini akan mencoba mengkaji bagaimana santri dan politik dalam ruang lingkup pentingnya santri berpolitik dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Penelitian ini mencoba memberikan ruang wawasan kritis dengan berfokus kepada studi literatur melihat sejauh mana santri bisa memberikan dampak Ketika mereka memiliki kesadaran dalam politik. Hal ini tentunya bisa dilihat dalam akses kajian teoritis dari teori partisipasi politik sebagai pisau analisis. Penelitian ini akan mencoba menjelaskan beberapa hal meliputi mengenai penjelasan sekilas apa itu santri?, kemudian pentingnya santri berpolitik,

kemudian apa dampak santri berpartisipasi dalam politik?, dan bagaimana Pendidikan politik bagi santri penting untuk mewujudkan generasi emas 2045?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*) yang berfokus pada kajian terhadap berbagai sumber literatur terkait peran santri melekat politik dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Penelitian ini mengandalkan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber daring yang relevan mengenai santri, politik, dan visi pembangunan Indonesia Emas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi sesuai tema penelitian, penyajian data disusun secara naratif untuk menggambarkan keterkaitan antara kesadaran politik santri dan cita-cita Indonesia Emas 2045, dan terakhir tahap penarikan kesimpulan bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai pentingnya santri melekat politik sebagai bagian dari kematangan generasi bangsa dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Definisi Santri

Santri yang berada di pesantren maupun yang tidak berada di pesantren adalah aset bagi agama, sosial, budaya, Negara dan Dunia. Maksud santri di sini bukan hanya yang berada di pesantren saja, akan tetapi yang mempunyai akhlak seperti santri dialah santri, selaras dengan definisi santri menurut KH. Mustofa Bisri “Santri bukan yang mondok saja, tapi siapapun yang berakhlak seperti santri, dialah santri.” Ungkapnya. Definisi santri ada banyak sekali yang dipaparkan oleh para ahli. Istilah santri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang berusaha mendalami agama Islam dengan sungguh-sungguh. John E. menyebut istilah “Santri” berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru ngaji. Istilah santri itu berasal dari kata “cantrik” diartikan seseorang yang selalu menyertai guru kemana guru pergi dan menetap (Nurul & Yani, 2015).

Ustadz Hari Surasman menuturkan pada acara pengajian dzikir dan sholawat sariro di kompleks Pondok Pesantren Al-Muayyad Mangkuyudan Surakarta, bahwa kata Santri (سنتری) dalam bahasa Arab, terdiri dari 5 huruf, yakni *sin*, *nun*, *ta'*, *ro'*, dan *ya'*. Artinya pertama adalah seorang santri harus menjadi *saafiqul khoir* atau pelopor kebaikan, dimanapun ia berada.

Kedua, *Naasibul Ulama* (penerus Ulama) santri merupakan para kader yang kelak diharapkan akan menjadi penerus para Ulama. Ketiga, *taarikul ma'ashi*, (meninggalkan maksiat). Sedangkan huruf *ro'* dan *ya'* di jabarkan sebagai syarat yang mesti dimiliki para santri, yaitu ridho Allah dan sifat yaqin.

Menurut Nurcholish Madjid etimologi kata “Santri” dapat dilihat dari dua perspektif. Pendapat pertama menyatakan bahwa “Santri” berasal dari “Sastri”, kata yang berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti “Melek huruf”. Menurut Nurcholish Madjid, komentar tersebut tampaknya didasarkan pada kelas literasi Jawa di mana para santri berusaha mendalami agama melalui buku-buku yang tertulis dalam berbahasa Arab gundul seperti kitab-kitab kuning. Selain itu, Zamakhsyari Dhofir menegaskan bahwa dalam bahasa India istilah santri mengandung arti seseorang yang mengetahui kitab suci Hindu, atau sarjana kitab suci Hindu. Yang secara umum dapat diartikan sebagai kitab suci, kitab agama, atau kitab ilmu pengetahuan (Achmadin et al., 2024).

Santri adalah para siswa yang mendalami ilmu-ilmu agama di pesantren baik dia tinggal di pondok maupun pulang setelah selesai waktu belajar. Zamakhsyari Dhofir membagi menjadi dua kelompok sesuai dengan tradisi pesantren yang diamatinya, yaitu:

- a. Santri mukim, yakni para santri yang menetap di pondok, biasanya diberikan tanggung jawab mengurus kepentingan pondok pesantren. Bertambah lama tinggal di Pondok, statusnya akan bertambah, yang biasanya diberi tugas oleh kyai untuk mengajarkan kitab-kitab dasar kepada santri-santri yang lebih junior.
- b. Santri kalong, yakni santri yang selalu pulang setelah selesai belajar atau kalau malam ia berada di pondok dan kalau siang pulang kerumah.

Dari pemaparan definisi di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa apa yang dikatakan santri itu adalah seseorang yang mempelajari ilmu-ilmu agama Islam di dalam pesantren (Santri mukim) maupun di luar pesantren (Santri kalong). Akhlak perilaku santri itu mencerminkan kebaikan, kejujuran dan kedisiplinan menunjukkan bahwa santri mempunyai ciri khas tersendiri.

Pentingnya Santri Tidak Buta Politik

Betapa pentingkah seorang santri untuk tidak bersikap acuh tak acuh terhadap politik. Penting kira sikap tidak peduli terhadap politik adalah hal yang kurang elok untuk diimani oleh seorang Muslim, karena politik sejatinya tidak sektor apa yang digunakan oleh para pengamat, itu hanyalah oknum daripada penjalan politik itu sendiri istilahnya oknum politisi. Muslim yang paham tentang esensi Islam akan menjalankan prilaku-prilaku di dunia ini dengan

bermanfaat semaksimal mungkin, diantaranya adalah menjadi politisi yang memang betul-betul untuk kemaslahatan umat dan masyarakat.

Buta adalah kita tidak bisa mengetahui atau melihat sesuatu, seperti halnya buta mata tidak bisa mengetahui indahnya dunia. Akan tetapi yang dimaksud buta politik ini adalah sikap tidak ingin tahu atau sikap yang memang kurang peduli terhadap pergulatan politik di Indonesia. Bertolt Brecht berkata bahwa buta yang terburuk adalah buta politik, dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Sikap kurang peduli terhadap politik tersebut tidak mencerminkan seorang muslim yang bermanfaat, karena dengan politik akan memberikan dampak manfaat yang sangat besar terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh kebijakan. Menguasai pendidikan politik adalah hal yang sangat dianjurkan dan penting, terlepas dari santri yang memang wajib mumpuni menguasai literatur-literatur Islam. Santri yang berpolitik bukan berniat hanya ingin mencari kekuasaan dan kekayaan untuk diri sendiri atau kelompoknya, akan tetapi untuk kemaslahatan umat dan masyarakat, karena dengan kertas selembat dan tanda tangan, maka tempat-tempat yang tidak bernuansa Islami akan mudah dihilangkan. Sangat penting tidak buta politik bagi para Santri!.

Perlu di ingat oleh kita semua bahwa banyak tokoh yang berperan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia, mulai dari aktivis, tokoh-tokoh agama-agama, termasuk para santri dan kiyai Pesantren, seperti KH. Wahab Hasbullah dengan organisasi Hizbullah. Kemudian KH. Hasyim Asyari yang terkenal dengan resolusi jihadnya. Lalu KH. Wahid Hasyim yang ikut berperan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Hal ini menandakan bahwa para santri dan kiyai sudah terlibat dalam politik di Indonesia. Maka untuk kita semua supaya terbuka dan melek terhadap politik di Indonesia Negara tercinta ini.

Di jelaskan dalam kitab Tafsir Al-Jalalain bahwa ada sekitar 12 Ayat yang menerangkan tentang politik, dalam paper ini penulis tidak akan menuliskan semua ayat tersebut, akan tetapi penulis akan mengambil diantara ayat-ayat saja, diantaranya dalam Surah At-Taubah [9]: Ayat 7 yang berbunyi *“Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan (mereka) di dekat Masjidil Haram? Maka selama mereka berlaku lurus kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”*

Disebutkan dalam Tafsir Al-Jalalain bahwa yang dimaksud dengan masjidil haram pada ayat di atas adalah pada hari Hudaibiyah, sedangkan yang dimaksud dalam kisah perjanjian ini adalah kafir Quraish yang sejak lama menyembah berhala. Ayat ini mengandung unsur politik dalam konteks sejarah dan situasi politik pada masa Nabi Saw di Makkah yang pada

awalnya menghadapi tantangan dari orang musyrik yang secara aktif berusaha menghalangi dan melawan Islam.

Terdapat juga dalam Surah Al-Maidah [5] Ayat 51 yang bernada “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.*”

Maksud menjadikan pemimpin adalah dengan mengikuti dan mencintai mereka. Mereka menjadi pemimpin sesama mereka karena kesatuan mereka dalam kekafiran dan bila kita menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka kita termasuk dalam golongan mereka.

Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah Swt melarang orang-orang yang beriman, hamba-hamba-Nya yang mukmin, untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pemimpin atau wali mereka. Hal ini disebabkan karena mereka adalah musuh-musuh Islam dan para pengikutnya. Semoga Allah mengutuk mereka. Allah juga menjelaskan bahwa sebagian dari mereka saling mendukung dan membantu satu sama lain.

Dalam konteks politik atau menjadikan pemimpin dalam Surah Al-Maidah di atas menjelaskan bahwa seseorang atau kelompok Muslim yang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani pemimpin bagi mereka, maka hal tersebut sangat tidak dianjurkan oleh Allah Swt selagi masih ada identitas pemimpin muslim.

Partisipasi Politik Santri Menunjukkan Bukti Santri adalah Generasi Emas Bangsa

Santri melek politik tentu harus menjadi satu kesadaran penting, setidaknya pemahaman mengenai melek politik dimulai dari santri memahami dasar dimana peran mereka sebagai warga negara. Indonesia menganut sistem demokrasi, yang mana menghendaki setiap warga negara terlibat dalam politik; baik dipilih maupun memilih. Kedua posisi ini tentunya memberikan kehendak nyata bahwa ketika santri memahami politik, artinya mereka akan menjalankan dirinya sebagai warga negara yang menganut sistem demokratisasi. Partisipasi politik merupakan nyawa dasar dari seseorang terlibat dalam politik, dalam hal ini partisipasi politik artinya seseorang sudah memiliki kesadaran penting untuk berpolitik (Yates, 2022).

Robert H. Salisbury (1975) menjelaskan bahwa tujuan dari partisipasi politik setidaknya memiliki tiga tujuan yang meliputi; *Pertama*, partisipasi politik berfungsi sebagai sarana legitimasi kekuasaan. Ketika warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan, misalnya melalui pemilihan umum atau bentuk-bentuk keterlibatan politik lainnya, mereka pada dasarnya memberikan dukungan atas otoritas yang ada secara legal, sehingga memperkuat

legitimasi kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah. *Kedua*, partisipasi politik merupakan cara efektif untuk memperoleh kekuasaan. Dalam hal ini, partisipasi dipandang sebagai upaya memperjuangkan hak-hak politik, memperluas hak suara, meningkatkan kontrol terhadap lingkungan, serta, yang paling penting, menjadi arena bagi para calon pemimpin untuk mendapatkan dukungan suara dalam pemilihan umum. Dan *Ketiga*, partisipasi politik bertujuan sebagai mekanisme penyelesaian konflik sosial (Heywood, 2002).

Tokoh seperti Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994) menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi politik dapat dilakukan secara spontan, secara berkesinambungan atau sporadis, secara damai atau secara kekerasan, legal atau tidak legal, efektif atau tidak efektif. Kemudian Miriam Budiardjo (2014) menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga masyarakat yang berkaitan dengan usaha untuk memilih penguasa/ pejabat-pejabat suatu negara dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Michael Rush dan Philip Althoff (2020) menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan sebuah tindakan yang merangsang diri terhadap kepedulian pada politik dengan melibatkan diri sejauh mana individu-individu sebagai warga negara terlibat dalam sistem politik dalam mempengaruhi sistem politik. Para pemikir yang menjelaskan arti partisipasi politik ini memberikan catatan penting, bahwa tujuan dari partisipasi politik untuk memberikan keaktifan warga negara untuk ikut serta dalam politik; baik dipilih maupun memilih.

Santri tentunya punya kesempatan untuk berpolitik, setidaknya mereka tidak bisa menjadi aktor politik yang dipilih sebagai otoritas kekuasaan, punya hak untuk memilih siapa yang menjadi aktor penguasa maupun juga memiliki hak sebagai warga negara. Bentuk-bentuk partisipasi politik dari santri berupa ikut berorganisasi, melakukan pemilihan umum, melakukan lobby, mencari koneksi, membuat acara, kegiatan konsumsi atau boikot, dan lain sebagainya merupakan aktivitas politik. Ketika narasi dalam politik diletakkan dalam otoritas kekuasaan, maka peran santri haruslah menjadi warga negara yang taat aturan, paham akan mana hak dan kewajiban. Partisipasi politik santri memberikan ruang kebebasan bagi santri juga sama dan setara posisi sebagai warga negara di sistem pemerintahan demokrasi, bahwasanya seperti dikemukakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 2 yang mengemukakan bahwa rakyatlah memegang kedaulatan tertinggi, dan siapa yang disebut rakyat di Indonesia?, yakni seluruh warga negara, termasuk para santri.

Partisipasi politik santri tentu memiliki pengaruh kuat dalam kekuasaan, jika dahulu sosok Gus Dur yakni presiden Republik Indonesia ke-4 yakni seorang santri menjadi pejabat negara membuktikan bahwa santri tidak sekedar hadir dalam duduk dakwah keagamaan

semata. namun santri merupakan penerus bangsa, yakni mereka yang punya peran besar dalam membangun negara, bahkan dapat dikatakan sebagai generasi emas bangsa 2045. Maka penting bagi sistem demokrasi yang memperlihatkan posisi desentralisasi kekuasaan dalam pengaturan demokratis memastikan bahwa cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai trias politik menjaga kondisi *check and balance* (Ma & Cao, 2023). Sekaligus juga memberitahukan bahwa semua kesempatan menjadi pemimpin negara boleh diakses oleh siapa saja dalam tingkat lokal maupun pusat, termasuk oleh para santri.

Dalam aspek pembangunan sendiri, hadirnya partisipasi politik dari kalangan santri dapat mencapai beberapa tujuan penting. Beberapa hal yang terjadi jika seandainya santri bisa terlibat dalam politik dalam negara demokrasi yang meliputi (Fahrezi et al., 2023);

- a. Meningkatnya kesadaran individu sebagai warga negara berdampak pada kualitas Pembangunan SDM

Adanya partisipasi politik santri, menunjukkan bahwa setiap individu dalam diri diikat dalam negara sehingga menjadikannya sebagai warga negara aktif dalam menentukan hak dan kewajiban. Santri tampil dalam dunia politik artinya mereka tidak harus menjadi seorang pemimpin negara, melainkan juga mereka harus sadar betul bahwa politik merupakan keniscayaan yang tak bisa dihindarkan, sehingga ia bisa menjadi seni untuk mencapai sebuah tujuan, sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles yang menjelaskan politik adalah kerja-kerja dari manusia.

- b. Meningkatkan keyakinan santri sebagai warga negara dalam peran secara aktif dalam mempengaruhi keputusan politik

Santri terlibat dalam politik memberikan ruang kesadaran bahwa politik bisa dikerjakan oleh siapa saja, karena hakikat manusia itu berpolitik, termasuk para santri, bahwa ketika santri melekat politik, maka mereka akan aktif terlibat dalam mempengaruhi keputusan politik dengan berbagai cara; yakni bisa saja melalui kritikan dari tulisan, maupun melakukan aksi turun ke jalan. Santri juga warga negara, dan mereka punya hak untuk bersuara. Jika melihat bagaimana santri mempengaruhi keputusan politik, ini bisa dibaca dari teori *self-realization* atau *self-actualization* yang dipaparkan oleh A.H. Maslow bahwa kemampuan individu untuk mewujudkan dirinya, meraih prestasi, dan menyadari potensinya sebagai bagian penting dalam sistem sosial yang lebih besar. Partisipasi politik bukan hanya sekadar hak, tetapi juga menjadi sarana bagi warga untuk merasa dihargai dan diakui, membangun kepercayaan diri, serta menanamkan rasa harga diri yang tinggi. Penting untuk dicatat bahwa partisipasi politik yang aktif dari kalangan santri merupakan

bentuk rasa rasa bangga atas kontribusi yang mereka berikan dalam kehidupan bernegara (Huntington & Nelson, 1994).

- c. Partisipasi politik dari santri juga menunjukkan ketaatan terhadap negara atau Nasionalisme

Sikap peduli kepada negara tentu dilakukan banyak cara, termasuk dengan ikut berpartisipasi dalam politik yang aktif sebagai warga negara. Santri ketika memiliki hak untuk berpolitik, maka mereka akan mencoba melakukan tindakan maksimal dengan mengutamakan nilai-nilai keagamaan, sebab santri memiliki background keagamaan, sehingga tujuan mereka berpolitik bukan kepentingan pribadi dan merugikan orang lain, melainkan keterlibatan mereka berpolitik untuk membuktikan perubahan demi kemajuan bangsa. Meleknya santri dalam politik berarti adanya ruang kesadaran aktif dan sadar warga negara berpartisipasi, maka menandakan ada rasa kepedulian dan taat terhadap negara, ini lah yang memunculkan sikap Cinta Tanah Air (Nasionalisme) dengan dilakukan dalam keseharian sebagai warga negara yang baik (Huntington & Nelson, 1994).

- d. Partisipasi Politik Santri Menunjukkan Sikap Bijaksana Sebagai Warga Negara Menghadapi Opini Negatif

Adanya kesadaran dan kepedulian terhadap negara sendiri atau seringkali di istilahkan sebagai nasionalisme atau Patriotisme merupakan dampak dari partisipasi politik. seperti yang diterangkan pada halaman sebelumnya bahwa partisipasi politik dapat meningkatkan sikap nasionalisme seorang santri sebagai warga negara (Huntington & Nelson, 1994). Partisipasi politik secara aktif merupakan langkah dari warga negara bersama dengan pemerintah dalam membangun negeri, sehingga ketika muncul tantangan dari dalam maupun luar negeri, maka tanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan merupakan tanggung jawab secara bersama-sama. Santri merupakan generasi emas bangsa, mereka adalah orang-orang terdidik, sekaligus juga memiliki kualitas terjamin soal akhlak, karena yang mereka pelajari bukan soal ilmu teoritis semata, namun ilmu praktis mengenai utilitas, sehingga santri melek dalam politik merupakan bentuk partisipasi politik untuk pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Santri berpolitik artinya bukan melulu soal santri terlibat sebagai pejabat pemerintah, namun mereka memahami bahwa dirinya hidup dalam keniscayaan sosial, dan tidak bisa menghindari bagaimana mereka berpolitik, karena adanya kepentingan-kepentingan. Michel

Foucault (1926-184) menerangkan bahwa semua manusia selalu berada pada situasi “relasi kuasa” yang mana posisi ini menghendaki ada yang berkuasa dan dikuasai. Kondisi berpolitik secara sederhana dapat dipahami dalam ruang pikir Foucault bahwa manusia tidak bisa menghindari diri mereka untuk berpolitik, sebab hakikat manusia itu berpolitik, terlepas bentuk politik yang mereka jalankan seperti apa; entah menjadi penguasa, atau hanya menjadi warga negara biasa.

Namun catatan pentingnya bahwa, santri tidak melulu harus memiliki stigma soal dakwah keagamaan. Mereka juga warga negara, punya kesempatan menjadi seorang pemimpin. Para santri yang ikut politik praktis seperti halnya KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menempati posisi penting sebagai Presiden ke-4 Republik Indonesia yang dikenal membawa nilai-nilai pesantren seperti toleransi, humanisme, dan keadilan sosial ke dalam politik nasional. KH. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Indonesia saat ini, juga merupakan representasi kuat dari kalangan santri yang menegaskan pentingnya moderasi beragama dan penguatan ekonomi syariah dalam pembangunan nasional. Sebelum mereka, tokoh-tokoh seperti KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahid Hasyim telah menanamkan dasar kuat bagi integrasi antara nilai keislaman dan kebangsaan, terutama dalam menjaga harmoni antara Islam dan Pancasila, Kemudian Tuan Guru Bajang di Lombok yang populer sebagai seorang tokoh keagamaan, seorang santri, namun pernah menjadi Gubernur di Nusa Tenggara Barat selama 2 periode. Dan masih banyak para pemimpin-pemimpin di Indonesia terlibat dalam politik praktis dari kalangan santri (Achmadi, et al., 2024).

Terlepas dari semua itu, santri harus benar-benar diberikan secara bebas sebagai wujud warga negara dan sama sekaligus setara terlibat dalam politik, setidaknya-tidaknya mereka memahami politik sebagai sebuah seni dan keniscayaan yang akan mereka jalani. Ketika hari ini stereotip santri dan politik dilihat cukup jauh, maka penting untuk memberikan ruang kesadaran bahwa keduanya tidak pernah terpisah; politik adalah seni untuk hidup, dan santri merupakan seorang warga negara, dan setiap warga negara secara khusus di Indonesia memiliki hak untuk berpendapat, bersuara, sekaligus kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Santri memiliki pemahaman mendalam mengenai kehidupan karena mereka belajar ilmu agama, sehingga banyak dari mereka bertindak selalu berpedoman kepada nilai-nilai keislaman. Sehingga ada kesadaran mengenai santri berpolitik, artinya santri memahami arti politik sebagai bentuk interaksi sosial dan rasional yang dilakukan dalam keseharian, dalam konteks makro seperti pemerintah, negara, dan kebijakan merupakan bagian salah satu dari politik (Yates, 2022).

Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Dengan Pendidikan Politik Bagi Santri

Penting kira untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 perlu banyak sekali yang harus kita benahi bersama, mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus ditanam sejak dini dengan nilai-nilai kejujuran dan tidak bermental koruptor dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan baik dan benar serta berorientasi untuk masyarakat secara umum, bukan hanya menumpuk harta untuk diri sendiri dan kelompoknya, sehingga melupakan masyarakat di sekitarnya, seperti kasus yang terjadi di pertambangan emas Freeport yang berada di Kabupaten Mimika, Papua Tengah (Wayoi, 2025).

Untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 salah satunya perlu adanya pendidikan yang berkualitas. Pendidikan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam mencapai generasi emas Indonesia di Tahun 2045 mendatang. Komponen-komponen seperti pemerintah, guru, dan siswa yang ada di dalam pendidikan harus saling mendukung satu sama lain, karena merekalah yang paling menentukan pendidikan seperti apa yang harus kita terapkan di Indonesia untuk mencapai generasi emas tersebut. Sistem pendidikan yang memungkinkan dihasilkannya pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten untuk mempersiapkan generasi 2045. Prof. Sunaryo mengemukakan, investasi pendidikan adalah prediktor masa depan bangsa yang tercermin dalam mutu sumber daya manusia yang dihasilkan melalui upaya pendidikan itu (Daran, 2017).

Diantara upaya untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 adalah kualitasnya pendidikan, merata dan dapat diakses oleh semua kalangan. Pemerintah dalam hal ini harus berkolaborasi dengan seluruh lembaga-lembaga pendidikan, pengampu pendidikan, serta dengan stakeholder-stakeholder pendidikan itu sendiri. Menyiapkan generasi 2045 sebagai generasi emas, Pemerintah dan perangkat pelaksana pendidikan tetap menjadikan proses pendidikan untuk semua (*education for all*) sebagai jalan utama dan menjadikan pekerjaan yang perlu dituntaskan. Sekaligus bukan hanya sekadar pemerataan, tetapi juga peningkatan kualitas (Daran, 2017).

Pendidikan Politik menjadi salah satu elemen urgent untuk dimengerti oleh seluruh kalangan, baik tua ataupun muda, seperti halnya kita sebagai seorang santri. Kita tidak boleh bersikap buta terhadap politik demi mewujudkan Indonesia emas 2045. 2045 adalah tahun ke 100 kita merdeka, sekarang 79 tahun kita sudah merdeka, tapi apakah kita merdeka 100%? Oh belum tentu, seperti apa yang di tesiskan oleh Tan Malaka dalam bukunya yang berjudul Menuju Merdeka 100%. 10 – 20 tahun ke depan adalah harapan-harapan untuk menjadikan Indonesia emas, apakah Indonesia emas atau Indonesia cemas dengan banyaknya kemerosotan yang ada di tahun belakangan ini (Aji, 2024).

Santri harus mendapatkan pendidikan politik secara kompherensif, memang mereka akan ada waktunya berpolitik dalam bentuk pemilihan umum ketika memenuhi syarat. Namun jangan sampai santri hanya duduk sebagai pemberi suara saja, hanya menjadi peran kehadirannya hanya dimanfaatkan ketika pemilu saja, setelah itu mereka diabaikan. Santri harus diberikan ruang untuk pendidikan politik, jelas tujuan utama sebagaimana dikemukakan diatas untuk mewujudkan Indonesia emas 2045, tentu usaha-usaha ini butuh waktu untuk membangun generasi emas, dan penting untuk dicatat generasi emas bangsa Indonesia adalah seluruh warga negara Indonesia, termasuk para santri juga perlu diberikan sosialisasi politik dari pemberian pendidikan politik.

Ketika pendidikan politik sukses diberikan, setidaknya ada harapan besar untuk melihat santri tumbuh menjadi warga negara cerdas, melek akan politik sekaligus juga bacground keagamaan mereka bisa memberikan ruang relevansi dengan nilai-nilai keagamaan. Harapan santri menjadi penerus generasi di masa depan tentu merupakan bagian yang diharapkan, santri berpolitik artinya seorang santri paham atau melek terhadap politik sehingga mereka bisa bertindak politis dalam keseharian mereka. semasih menjadi santri, mereka paham betul tindakan ikut kegiatan, membuat acara, meloby kiyai, sampai dengan musyawarah merupakan aktivitas politik yang melatih mereka menjadi seorang warga negara yang baik untuk mencapai sebuah tujuan bersama (Pattpeilohy et al., 2018).

4. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, diperoleh beberapa kesimpulan mengenai pentingnya santri untuk tidak buta politik dan bagaimana santri menjadi *agent of change* untuk mewujudkan Indonesia emas 2045. *Pertama*, secara ringkas definisi santri itu adalah seseorang yang menuntut ilmu Agama di Pesantren, baik yang mukim atau yang tidak mukim. Istilah santri dalam bahasa Sansekerta adalah “*Sastri*” yang mempunyai arti “Orang yang melek huruf”. *Kedua*, pentingnya santri untuk tidak buta politik. Bagaimanapun juga santri harus berwawasan luas tentang pergulatan politik di Indonesia yang beragam ini. Niat yang harus terpatrit dalam hati dan diri santri adalah untuk perbaikan dan kebaikan politik Indonesia ke depan. Santri harus semaksimal mungkin untuk mendapatkan ruang-ruang sentral dalam politik, menjadi politisi hebat yang lahir dari rahim Pesantren dapat memberikan nilai-nilai plus bagi keberlanjutan politik di Indonesia. Maka dari itu kita sebagai santri haram hukumnya bersikap acuh tak acuh kepada politik itu sendiri!.

Ketiga, Keterlibatan santri dalam politik dapat meningkatkan kesadaran individu sebagai warga negara yang aktif, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia

(SDM). Partisipasi politik juga memperkuat keyakinan santri sebagai warga negara untuk berperan aktif dalam mempengaruhi keputusan politik, baik melalui pemikiran kritis, tulisan, maupun aksi sosial. Keterlibatan santri dalam politik bukan hanya wujud aktualisasi diri, tetapi juga bentuk ketaatan terhadap negara yang mencerminkan nilai nasionalisme dan cinta tanah air. Dengan bekal nilai keagamaan yang kuat, santri menjadikan politik sebagai sarana pengabdian, bukan ambisi pribadi, melainkan kontribusi nyata demi kemaslahatan bangsa. partisipasi politik santri menumbuhkan sikap bijaksana dan tangguh dalam menghadapi opini negatif serta tantangan sosial-politik, menunjukkan bahwa santri bukan hanya agen moral, tetapi juga agen perubahan yang berperan aktif dalam pembangunan, menjaga stabilitas, dan memperkuat karakter kebangsaan Indonesia. *Keempat*, Perlu banyak hal yang harus kita perbaiki bersama menuju kemerdekaan yang ke-100 tahun di tahun 2045, diantaranya adalah dalam sektor pendidikan untuk santri mendapatkan pendidikan politik, hal yang sangat penting pula adalah pendidikan politik yang merata terhadap santri pada umumnya. Ketika santri pendidikan politiknya bagus, maka mereka nantinya akan menjadi masyarakat lebih bijaksana dalam menentukan pilihan politisi yang akan memimpinnya kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman al-Jauzi, *Zad al-Masiyr fii 'Ilmi at-Tafsir*.

Abu al-Fida' Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al- 'Adzhim*.

Achmadin, B. Z., Kawakip, A. N., Nafis, M. M., & Ghaffar, A. R. E. S. A. (2024). Reorienting Pesantren Education in East Java: A Critical Analysis of the Thought of Zamakhshary Dhofier and Abdurrahman Mas' ud. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 18(1), 41-63.

Aji, W. T. (2024). Tan Malaka: The concept of 100% independence in perfecting the independence of the Republic of Indonesia. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 7(2), 45–61.

Asiyah, S., & Chasanudin, A. (2020). Pondok pesantren dan dakwah politik: Kajian histori Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 40(1), 27–39.

Darman, R. A. (2017). Mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045 melalui pendidikan berkualitas. *Jurnal Edik Informatika: Penelitian Bidang Komputer Sains dan Pendidikan Informatika*, 3(2).

Fahrezi, M. S., Aulia, P. A., & Santoso, G. (2023). Membela tanah air dengan segenap jiwa: Peran dan tanggung jawab generasi muda dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan bangsa. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(2).

- Fakhrurrazi, F., Zainuddin, Y., & Zulkarnaini, Z. (2021). The pesantren: Politics of Islamic and problematic education Muslim identity. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 3(6), 392–396.*
- Garuda, M. (2018). *Indonesia 2045*. Bentang Pustaka.
- Herberg, J. A., Seeliger, M., & Möller, K. (2023). What is political sociology, when politics is everywhere? An invitation to a new journal. *Political Sociology Review*.
- Heywood, A. (2002). *Politics* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- <https://lampung.nu.or.id/opini/pentingnya-santri-terjun-di-bidang-politik-PxJf8>.
- <https://nu.or.id/daerah/5-makna-penting-seorang-santri-ho3f8>.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. (1994). *Partisipasi politik di negara berkembang* (S. Simamora, Trans.). PT Rineka Cipta.
- Jalaluddin as-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir al-Jalalain*.
- Ma, Z., & Cao, Y. (2023). Political participation in China: Towards a new definition and typology. *Social Sciences*, 12(10).
- Miriam, et al. (2014). *Pengantar ilmu politik*. Universitas Terbuka.
- Muhammad, N. H., & Yani, M. T. (n.d.). Pelanggaran santri terhadap peraturan tata tertib Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Lamongan.
- Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*.
- Pattipeilohy, A., Yusuf, N., & Handayani, T. (2018). Analisis dampak pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di SMAN 1 Balauring Lembata NTT. *Jurnal Civic Hukum*, 3(2), 128–137.
- Putri, R. (2023). Perubahan pola perilaku memilih kaum santri dalam pemilu daerah serentak 2020 di Kabupaten Sumenep. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 15(2), 169–180.
- Rahman, L. M. F. (2023). Transformasi sosial politik kaum santri di Lombok. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, 5(1), 123–169.
- Rismawati, S. (2022). Analisis perilaku politik santri Pondok Pesantren Qomaruddin Bungah dalam pemilihan Bupati Gresik 2020. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 10(3), 555–569.
- Rush, M., & Althoff, P. (2020). *Pengantar sosiologi politik*. PT Grafindo Persada.
- Salisbury, R. H. (1975). Research on political participation. *American Journal of Political Science*, 19(2), 323–341.*
- Sumantri, I. (2020). Menyoal pilihan politik santri: Studi kasus Ponpes Al Munawwir Krapyak Bantul. *Journal of Political Issues*, 1(2), 134–142.

- Susilastuti, et al. (2015). *Pengantar ilmu politik: Membedah paradigma politik di Indonesia—teori dan praktek*. UPN “Veteran” Yogyakarta.
- Wayoi, D. E. A. (2025). Penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas dan tembaga tanpa izin di wilayah PT Freeport Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(1), 146–167.
- Yates, L. (2021). Prefigurative politics and social movement strategy: The roles of prefiguration in the reproduction, mobilisation and coordination of movements. *Political Studies*, 69(4), 1033–1052.*
- Yates, L. (2022). How everyday life matters: Everyday politics, everyday consumption and social change. *Consumption and Society*, 1(1), 144–169.*